

**PENGARUH PEMAHAMAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

(Studi Kasus Pada Komite Pengusaha Alas Kaki di Kota Mojokerto)

USULAN PENELITIAN

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur



Oleh :

LUCKY ERYUNIARTO
0513310086/FE/EA

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAWA TIMUR
2012**

PENGARUH PEMAHAMAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Kasus Pada Komite Pengusaha Alas Kaki di Kota Mojokerto

SKRIPSI



Oleh :

LUCKY ERYUNIARTO
0513310086/FE/EA

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
2012

USULAN PENELITIAN

PENGARUH PEMAHAMAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Kasus Pada Komite Pengusaha Alas Kaki di Kota Mojokerto)

yang diajukan :

LUCKY ERYUNIARTO
0513310086/FE/EA

telah disetujui untuk diseminarkan oleh

Pembimbing Utama

Dr. Sri Trisnaningsih, SE, MSi
NIP. 1965092919922032001

Tanggal :

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Sri Trisnaningsih, SE, MSi
NIP. 1965092919922032001

USULAN PENELITIAN

PENGARUH PEMAHAMAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Kasus Pada Komite Pengusaha Alas Kaki di Kota Mojokerto)

yang diajukan :

LUCKY ERYUNIARTO
0513310086/FE/EA

telah diseminarkan dan disetujui untuk menyusun skripsi oleh

Pembimbing Utama

Dr. Sri Trisnaningsih, SE, MSi
NIP. 1965092919922032001

Tanggal :

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Sri Trisnaningsih, SE, MSi
NIP. 1965092919922032001

SKRIPSI

PENGARUH PEMAHAMAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Kasus Pada Komite Pengusaha Alas Kaki di Kota Mojokerto)

yang diajukan :

LUCKY ERYUNIARTO
0513310086/FE/EA

disetujui untuk ujian lisan oleh

Pembimbing Utama

Dr. Sri Trisnaningsih, SE, MSi
NIP. 1965092919922032001

Tanggal :

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi

Drs. Ec. H. R.A. Suwaidi, MS
NIP. 196003301986031003

SKRIPSI

PENGARUH PEMAHAMAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Kasus Pada Komite Pengusaha Alas Kaki di Kota Mojokerto)

Disusun oleh :

LUCKY ERYUNIARTO

0513310086/FE/EA

telah dipertahankan dihadapan
dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada tanggal, 25 September 2012

Pembimbing Utama

Tim Penguji Utama
Ketua

Dr. Sri Trisnaningsih, SE. MSi
NIP. 1965092919922032001

Dr. Sri Trisnaningsih, SE. MSi
Sekretaris

Drs. Ec. Eko Riyadi, MAks
Anggota

Dra. Ec. Erna Sulityowati, MM

Dekan Fakultas Ekonomi

DR.H. Dhani Ichsanudin Nur, MM
NIP. 030.202.389

KATA PENGANTAR

Dengan memenjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmatnya yang dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PENGARUH PEMAHAMAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK” (Studi Kasus pada Komite Pengusaha Alas Kaki Kota Mojokerto).

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan ekonomi akuntansi, di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis sangat berterima kasih atas segala bantuan dan fasilitas dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis guna mendukung penyelesaian skripsi ini. Maka, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. R. Teguh Soedarto, MP selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Dr Dhani Ichsanudin, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dr. Sri Trisnaningsih, SE, Msi selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Drs. Ec. H. R.A. Suwaidi, MS selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

5. Ibu Dr. Sri Trisnaningsih, SE, Msi selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberi bimbingan, trima kasih atas semua saran, motivasi, bimbingan, dan bantuannya selama penyusunan skripsi ini.
6. Segenap tenaga pengajar, staf, dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Bapak dan Ibu kandung trima kasih atas kasih sayang, kesabaran, semangat, dan dukungan moril maupun materiil dengan tulus ikhlas tanpa pamrih.
8. Mas EDI, dan Mas songke yang nenantiasi membantu dalam pengeprintan dan fothocopy.
9. Agong, Ketut

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAK	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Landasan Teori	10
2.2.1` Pajak	10
2.2.1.1 Pengertian Pajak	10
2.2.1.2 Fungsi Pajak	11
2.2.1.3 Syarat – Syarat Pemungutan Pajak	12
2.2.1.4 Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak	13

2.2.1.5 Pengelompokan atau Pembagian Pajak	15
2.2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak	16
2.2.1.7 Penerapan Tarif Pajak	17
2.2.2 Pajak Penghasilan	
2.2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan	18
2.2.2.2 Subjek Pajak.....	18
2.2.2.3 Objek Pajak	20
2.2.3 Dasar Pembukuan dan Pencatatan	21
2.2.3.1 Dasar Pembukuan Penghasilan Kena Pajak (PKP)21	
2.2.3.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak	22
2.2.3.3 Tarif Pajak	23
2.2.4 Pemahaman Wajib Pajak	23
2.2.5 Kesadaran Wajib Pajak	24
2.2.6 Kepatuhan Wajib Pajak	25
2.2.7 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	27
2.2.8 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	28
2.3 Kerangka Pikir	29
2.4 Hipotesis	29

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional dan Teknik Pengukuran Variabel	30
---	----

3.1.1 Definisi Operasional	30
3.1.2 Teknik Pengukuran Variabel	31
3.2 Teknik Penentuan Sampel	31
3.2.1 Populasi	31
3.2.2 Sampel	32
3.3 Teknik Pengumpulan Data	
3.3.1 Jenis dan Sumber Data	32
3.3.2 Metode Pengumpulan Data	33
3.4 Uji Kualitas Data	33
3.4.1 Uji Validitas	33
3.4.2 Uji Reliabilitas	34
3.4.3 Uji Normalitas	34
3.5 Asumsi Klasik	35
3.6 Teknik Analisis dan Uji Hipotesis	36
3.6.1 Teknik Analisis	36
3.6.2 Uji Hipotesis	37
3.6.2.1 Uji Kesesuaian Model atau Uji F	37
3.6.2.2 Uji Persial atau Uji t	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Obyek Penelitian	40
4.1.1. Sejarah Kota Mojokerto	40

4.1.2. Sejarah Komite Pengusaha Alas Kaki (KOMPAK)	
Kota Mojokerto	41
4.1.3. Maksud dan Tujuan Komite Pengusaha Alas Kaki	
(KOMPAK) Kota Mojokerto	41
4.1.4. Struktur Kepengurusan Komite Pengusaha Alas Kaki	
(KOMPAK) Kota Mojokerto	42
4.2. Deskripsi Hasil Penelitian	42
4.3. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis	46
4.3.1. Uji Analisis Data	46
4.3.1.1. Uji Validitas, Reliabilitas dan Normalitas	46
4.3.1.1.1. Uji Validitas	46
4.3.1.1.2. Uji Reliabilitas	47
4.3.1.1.3. Uji Normalitas	48
4.3.2. Uji Asumsi Klasik	49
4.3.3. Teknik Analisis Regresi Linier Berganda	51
4.3.4. Uji Hipotesis	52
4.3.4.1. Uji Kesesuaian Model	52
4.3.4.2. Uji t	53
4.4. Pembahasan	55
4.4.1. Implikasi	55
4.4.2. Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya	58
4.4.3. Konfirmasi Hasil Penelitian Dengan Tujuan Dan	
Manfaat	58

4.5. Keterbatasan Penelitian	59
------------------------------------	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	60
5.2. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kepatuhan Pelaporan SPT PPh OP Usahawan KPP Pratama Mojokerto	5
Tabel 4.1	Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai : Pemahaman Wajib Pajak (X ₁)	43
Tabel 4.2	Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai : Kesadaran Wajib Pajak (X ₂)	44
Tabel 4.3	Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	45
Tabel 4.4	Hasil Uji Validitas	46
Tabel 4.5	Hasil Uji Reliabilitas	47
Tabel 4.6	Hasil Uji Normalitas	48
Tabel 4.7	Hasil Uji Multikolinieritas	49
Tabel 4.8	Hasil Uji Heteroskedastisitas	50
Tabel 4.9	Hasil Pendukung Parameter Regresi Linier Berganda	51
Tabel 4.10	Hasil Analisis Hubungan Kesesuaian Modal	52
Tabel 4.11	Koefisien Determinasi (R square / R ²)	53
Tabel 4.12	Hasil Analisis Varians Hubungan Secara Parsial	54
Tabel 4.11	Koefisien Determinasi (R square / R ²)	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Diagram Krangka Pikir	29
--	----

**PENGARUH PEMAHAMAN DAN KESADARAN WAJIB
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus pada Komite Pengusaha Alas Kaki Kota Mojokerto).**

Lucky Eryuniarto

Abstraksi

Pajak didasarkan pada Undang – Undang yang berarti bahwa pemungutan pajak tersebut sudah disepakati atau disetujui bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Harapan pemerintah terhadap semua wajib pajak mengenai pembayaran tanpa adanya kecurangan. Maka sudah seharusnya masyarakat sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak. Masyarakat harus membayar pajak dengan benar sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Namun kenyataannya banyak hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak, wajib pajak tersebut tidak menguasai benar tentang Undang – Undang perpajakan sehingga Dirjen Pajak menanggapi hal tersebut sebagai ketidakpatuhan dan memberi pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat untuk memperoleh kepatuhan akan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Pengukuran variabelnya menggunakan skala Likert dengan skala data yang digunakan berupa skala interval. Sedangkan alat ukur yang dipakai untuk mengukur variabel ini menggunakan strategi survey dengan model impersonal. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan uji hipotesisnya berupa uji F dan uji t. Untuk mengelola data yang diperoleh digunakan SPSS.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis yang menyatakan diduga pemahaman dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak studi kasus pada komite pengusaha alas kaki Kota Mojokerto, tidak terbukti kebenarannya.

Keywords: pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi diarahkan untuk mewujudkan perekonomian dan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata. Oleh karena itu pemerintah berusaha terus - menerus meningkatkan peranan sumber penerimaan negara, terutama penerimaan yang berasal dari non migas. Penerimaan dari non migas ini sebagian akan ditingkatkan melalui penerimaan dari sektor pajak. Misi utama Direktorat Jendral Pajak adalah misi fiskal yaitu menghimpun penerimaan pajak berdasarkan Undang – Undang Perpajakan yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien (Suryadi, 2006 : 106).

Pajak merupakan sarana yang digunakan pemerintah untuk memperoleh dana dari rakyat. Hasil penerimaan pajak tersebut untuk mengisi anggaran negara sekaligus membiayai keperluan belanja negara (belanja rutin dan belanja pembangunan). Untuk itu, negara memerlukan dana yang cukup besar guna membiayai kegiatan pembangunan yang berlangsung terus - menerus dan berkesinambungan. Pajak dibedakan menjadi dua fungsi yaitu fungsi budgetair (sumber penerimaan negara) dan fungsi regulierend (mengatur). Fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sedangkan fungsi regulierend artinya pajak sebagai alat untuk

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Dari fungsi ini pada dasarnya pemerintah ingin kembali menegaskan peranan penting pajak baik sebagai alat penerimaan negara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maupun sebagai alat untuk melaksanakan berbagai kebijakan di bidang sosial ekonomi (Resmi, 2008 : 3).

Dalam rangka upaya peningkatan penerimaan pajak, pemerintah melakukan perubahan mendasar dengan dikeluarkannya UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merubah sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia yaitu digunakannya self assessment system yang menggantikan official assessment system. Kedua sistem ini memiliki perbedaan dalam mekanisme dan sudut pandang terhadap wajib pajak.

Pada official assessment system, petugas pajak berkewajiban menetapkan berapa besar sesungguhnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, sedangkan pada self assessment system, wajib pajak berkewajiban, menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Walaupun berbeda, kedua sistem penetapan pajak tersebut dalam praktiknya tetap memerlukan pengawasan dari pihak pemerintah dalam bentuk pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Sofyan, 2003 : 30).

Sistem self assessment memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Supadmi, 2006).

Hal ini dapat digunakan untuk mengukur perilaku wajib pajak, yaitu seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat, semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, ketepatan menyeter serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat, maka diharapkan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajibannya.

Dalam rangka untuk pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak disamping menyelenggarakan pembukuan, harus pula melengkapi dengan laporan keuangan yang berupa neraca, dan perhitungan laba – rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 4 ayat 4 yang berbunyi yaitu pembukuan yang tertib dan benar dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan memadai untuk mendukung perhitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP), sehingga Wajib Pajak dapat mengisi serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar dan tepat waktu.

Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan negara, dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraannya. Terlepas dari kesadaran sebagai warga negara, sebagian besar masyarakat tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Dalam hal demikian timbul perlawanan terhadap pajak. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif (Waluyo & Ilyas, 2002: 11).

Penerimaan perpajakan Indonesia dari Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi pada 2008 hanya 22,89%, sedangkan penerimaan dari PPh badan terhadap realisasi penerimaan PPh nonmigas mencapai 77,11%. Di negara maju, penerimaan PPh orang pribadi justru lebih besar ketimbang badan. Atas realisasi itu, pemerintah mengajukan Rancangan Undang - Undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perppu) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menjadi UV (Daily Indonesia, 2009).

Dengan adanya perpanjangan sunset policy masyarakat diharapkan semakin banyak dan lebih terbuka mengungkapkan data perpajakannya. “Peranan penerimaan PPh orang pribadi di negara maju lebih besar, sejalan dengan kesadaran akan kewajiban warga negara bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiban konstitusional dan sejalan dengan cita – cita demokrasi bangsa,” kata Menteri Keuangan (MenKeu) Sri Mulyani Indrawati pada raker dengan komisi XI di Jakarta. Dia menjelaskan, tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak orang pribadi di Indonesia masih tergolong kurang antara lain karena lemahnya mekanisme check and balances terkait sistem self assessment dalam pemungutan pajak (Daily Indonesia, 2009).

Untuk meningkatkan penerimaan pajak perlu juga dilakukan penyempurnaan aparatur perpajakan serta mempersiapkan para Wajib Pajak yang telah diberi kebebasan dan kepercayaan yang besar dalam menghitung dan membayar sendiri pajaknya. Oleh sebab itu usaha pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak ini harus dimulai mewujudkannya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Mojokerto Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan Kota Mojokerto tahun 2009 sebesar Rp 2.799.306.407,00 -, dan pada tahun 2010 sebesar Rp 2.407.228.366,00 -, mengenai kepatuhan terhadap penyampaian SPT, dapat diketahui dalam penyampaian SPT tahun 2009 dan tahun 2010 yang disajikan pada table 1.1, sebagai berikut :

Tabel 1.1
Kepatuhan Pelaporan SPT PPh OP Usahawan
KPP Pratama Mojokerto
Tahun 2009 - 2010

Tahun	Jumlah NPWP	SPT yang Dilaporkan	Prosentase
2009	9.883	3.548	35,9 %
2010	16.223	4.658	28,7 %

Sumber : KPP Pratama Kota Mojokerto Seksi PDI

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2009 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Mojokerto, Kota Mojokerto sebanyak 9.883 Wajib Pajak, namun jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang lapor sebanyak 3.548 Wajib Pajak dengan prosentase sebesar 35,9% dari jumlah keseluruhan, sedangkan pada tahun 2010 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang terdaftar semakin meningkat yaitu menjadi 16.223 Wajib Pajak, namun jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang lapor sebanyak 4.658 Wajib Pajak dengan prosentase sebesar 28,7%. Dari kondisi ini berarti masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya

Berdasarkan fenomena diatas, khususnya mengenai pajak, peneliti ingin mencoba meneliti dengan mengambil judul penelitian “Pengaruh

Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Komite Pengusaha Alas Kaki di Kota Mojokerto ”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah apakah pemahaman dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi kasus pada Komite Pengusaha Alas Kaki di Kota Mojokerto) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris pengaruh dari pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi kasus pada Komite Pengusaha Alas Kaki di Kota Mojokerto)

1.4. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang dikemukakan, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, yaitu antara lain:

1. Bagi Pengrajin

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat bahwa pemahaman dan kesadaran wajib pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi sebagai perbandingan yang akan datang serta sebagai tambahan perpustakaan yang sudah ada.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh, khususnya bidang perpajakan.

4. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Direktorat Jendral Pajak terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga temuan ini nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk mengetahui tingkat kepatuhan sebelum dilakukan pemeriksaan pajak lebih lanjut.